

Liku, Yohanes., Suhardiman., Nanik Pujiastuti. (2020). Peran Camat Dalam Koordinasi Administrasi di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. *Vol. 1(2). 104-121.*

Peran Camat Dalam Koordinasi Administrasi di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Yohanes Liku^{1*}, Suhardiman², Nanik Pujiastuti³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

7 Mei 2020

Received in revised form:

3 Juni 2020

Accepted:

30 Juni 2020

Keyword:

Koordinasi AdminstrasiCompetency and Performance

Kata Kunci:

Koordinasi Adminstrasi

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and describe how the Role of Camat in Coordination of Administration in Barong Tongkok District of West Kutai Regency. This type of research is descriptive qualitative research. To obtain research data, especially with the researcher's interview technique using the Purposive Sampling method, then to obtain valid data, the researcher triangulates the source that allows for researchers to double-check and can complete information from various sources. From the results of the study, it can be concluded that the Role of Camat in Coordination of Administration in Barong Tongkok District of West Kutai Regency is both vertical with related agencies and horizontal administrative coordination with the heads of sections in the Barong Tongkok District Office. From the results of the study, coordination of administrative services of the district government in providing administrative services to the community there are inhibiting factors, namely the lack of facilities in the smooth administrative process such as a long administrative system, lack of professional staff in carrying out their duties and there is one village that has a long distance from the District Office. Supporting factors in providing administrative services to the community are the availability of budgets in the process of improving administrative services and the availability of Daran facilities and infrastructure that support in the process of administrative services to the community.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menggambarkan bagaimana Peran Camat dalam Koordinasi Administrasi di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data penelitian, khususnya dengan teknik wawancara peneliti menggunakan metode Purposive Sampling, kemudian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti melakukan triangulasi sumber yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengecekan ulang serta dapat melengkapi informasi dari berbagai sumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Camat dalam Koordinasi Administrasi di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat baik bersifat vertikal dengan instansi terkait maupun koordinasi administrasi horisontal dengan kepala seksi-seksi yang ada di Kantor Kecamatan Barong Tongkok. Dari hasil penelitian tersebut, Koordinasi pelayanan administrasi pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat terdapat faktor penghambat yaitu kurang tersedianya sarana dalam kelancaran proses administrasi seperti sistem administrasi yang masih panjang, kurang profesionalnya staf dalam menjalankan tugas serta terdapat satu Kelurahan yang memiliki jarak yang jauh dengan Kantor Kecamatan. Faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ialah tersedianya anggaran didalam proses meningkatkan pelayanan administrasi dan terdapatnya fasilitas daran dan prasarana yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi kepada masyarakat

* Corresponding author: liku@untag-smd.ac.id

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahnya berada disentral paling depan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan tujuan Negara dan Nasional yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang memadai di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan dibidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut maka perlunya pelaksanaan koordinasi oleh pemerintahan dalam upaya memadukan, menyeraskan, menyelaraskan dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta semua kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horisontal yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama.

Hal ini perlu adanya penyesuaian segala kegiatan dan penyatuan terhadap bagian masing-masing antara satu dengan yang lainnya dan penyaluran usaha-usaha atau kegiatan pemerintahan, sehingga kegiatan tersebut saling mengisi dan terarah untuk mencapai tujuan pokok. Kebutuhan akan adanya koordinasi ini sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang corak dan ragamnya sangat banyak jumlahnya sering kali kelihatan, bahwa penyelenggaraan tugas seperti berlainan satu sama lainnya, sedangkan objeknya adalah masyarakat.

Administrasi selalu berkaitan pada kondisi, situasi, waktu, dan tempat. Sebagai proses dalam penyelenggaraan administrasi terkandung dalam pemikiran yang sangat mendasar yaitu bahwa semakin lama proses administrasi itu berlangsung, harus diupayakan agar dapat mencapai tingkat dan mutu yang tinggi dan berkualitas serta mencapai tujuan.

Administrasi juga memiliki unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang atau lebih dan orang-orang tersebut bekerjasama dalam hubungan yang sifatnya formal dan hirarkis, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan tersedianya sarana dan prasarana tertentu. Dan dalam pengertian modern kerja sama yang dilakukan itu dilaksanakan secara sadar, rasional, terencana dan dengan organisasi yang teratur.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yaitu Bupati atau Walikota yang bersangkutan.

Camat bertugas menetapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan kemasyarakatan serta menangani sebagian urusan daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dalam hal ini Camat bertanggung jawab atas kelancaran urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam wilayah pemerintah Kecamatan pada khususnya dan Kelurahan pada umumnya dalam lingkup wilayah kerjanya sebagai Kepala Kecamatan yang mengawasi seluruh Kelurahan tugas Camat sangat kompleks sebagai perangkat daerah.

Untuk kelancaran roda pemerintahan administrasi, Camat harus selalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat dibawahnya dalam hal ini adalah seluruh staf dilingkungan wilayah Kecamatan dan seluruh staf dilingkungan Kelurahannya masing-masing serta didalam hal ini Camat harus melakukan koordinasi dengan para aparat atau pejabat di tingkat atasnya dan aparat yang setingkat dalam tingkat organisasi, dengan adanya koordinasi yang baik maka dapat mewujudkan suatu tujuan yang serempak, penyatuan dan penyelarasan kegiatan-kegiatan pemerintahan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Camat senantiasa harus dapat melakukan koordinasi sehingga tidak terjadi kesenjangan disegala bidang.

Sekalipun pada umumnya telah didasari tentang pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi dan manajemen pemerintah, tetapi kenyataannya dalam prakteknya tidak jarang terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan pelaksanaan koordinasi tidak berjalan semestinya seperti kinerja aparat/pegawai di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat rendah, pengawasan yang dilakukan oleh Camat pada bidang pekerjaan belum berjalan sebagaimana mestinya, didalam penyelesaian tugas-tugas pekerjaannya para pegawai tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, masing tingginya tingkat absensi jam kerja para pegawai sehingga, pencapaian tujuan dan sasaran tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya kendala yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Camat terhadap pelaksanaan administrasi di lingkup wilayah Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
2. Belum adanya kerjasama yang baik antara Camat dengan instansi-instansi terkait.

Dengan demikian untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya koordinasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh camat agar pelaksanaan administrasi pemerintahan di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan perlu diadakan peningkatan kerja sama yang baik antar Camat dengan instansi-instansi terkait.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : " Bagaimana Peran Camat Didalam Koordinasi Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ? "

Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, hal ini dimaksud untuk memberikan arahan kepada seorang peneliti dalam melakukan pekerjaan dan dapat menentukan kemana seharusnya berjalan dan berbuat. Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran Camat dalam Koordinasi Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang penyelenggara kegiatan administrasi Pemerintahan di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa indikator yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Peran koordinasi yang Dilakukan oleh Camat
 - a. Koordinasi Vertikal.
 - b. Koordinasi Horisontal.
2. Keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordiansi dalam
 - a. Memecahkan masalah.
 - b. Memberikan saran.
3. Koordinasi pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan.
4. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan Administrasi kepada masyarakat.

Perlu penulis jelaskan bahwa data yang penulis peroleh adalah data primer dengan teknik wawancara dan juga data sekunder dengan melihat pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Kantor Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Dari data yang ada penulis menganalisis data secara kualitatif.

Berikut ini akan disajikan data-data hasil penelitian yang berkenaan dengan hal tersebut:

Peran Koordinasi yang Dilakukan Oleh Camat

Koordinasi Vertikal

Frekuensi pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal menunjuk pada seberapa besar kegiatan koordinasi yang bersifat vertikal dilaksanakan. Hal ini penting karena Camat dalam selaku pimpinan di lingkungan pemerintah Kecamatan harus dapat menjamin serta membentuk keserasiaan dan keterpaduan terhadap para aparat Pemerintahan bawahannya dalam suatu tujuan dan bekerjanya aparatur pemerintahan, maka diperlukan adanya pengaturan-pengaturan yang dapat berwujud suatu peraturan tata tertib dan kerja sama secara keseluruhan didalam pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal.

Dengan adanya koordinasi yang bersifat vertikal ini Camat sebagai seorang pimpinan berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan administrasi Pemerintahan Kecamatan. Dengan demikian Camat sangat perlu untuk mengadakan pengkoordinasian dengan bawahannya.

Mengenai frekuensi pelaksanaan koordinasi bersifat vertikal yang diadakan oleh Camat maka dalam hal ini Kepala Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Bapak Yulius Aliansyah, S.IP memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Didalam pelaksanaan Koordinasi yang bersifat vertikal pelaksanaannya dilakukan 1 bulan 2 kali termasuk koordinasi di tingkat Kelurahan yang ada di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat karena, saya menyadari betapa pentingnya peranan koordinasi dalam meningkatkan pembangunan disegala bidang serta untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan apa saja yang terjadi ditingkat bawahan ."

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Sarjono yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Selama ini Camat melakukan koordinasi dengan kami setiap 1 bulan sekali termasuk dengan seluruh staf pegawai Kecamatan. Hal ini mungkin terjadi karena Camat sendiri memiliki begitu banyak kesibukan dan waktu yang terbatas dalam menjalankan tugas pemerintahan sehingga terkadang pelaksanaan koordinasi ini diwakilkan oleh Sekretaris Camat "

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Lurah Simpang Raya Iis Normiyati, SH untuk mengetahui frekuensi koordinasi yang dilaksanakan Camat Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat di tingkat Desa yaitu sebagai berikut :

"Frekuensi koordinasi yang dilakukan oleh Camat terhadap Kelurahan Berbas Pantai itu naik turun hal ini terjadi karena tergantung banyaknya permasalahan dan kegiatan yang terjadi serta sudah diberlakukannya SKPD kepada tiap-tiap Kelurahan untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing terutama masalah keuangan namun paling tidak setiap 1 bulan 2 kali antara Camat dan pihak kami selalu melaksanakan koordinasi demi mencapai suatu tujuan."

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Yulius Aliansyah, S.IP selaku Kepala Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tentang waktu pelaksanaan Koordinasi bersifat vertikal yang diadakan oleh Camat sebagai berikut :

"Waktu pelaksanaan koordinasi vertikal ini biasanya saya adakan misalnya setiap adanya permasalahan dan kegiatan yang terjadi baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan yang perlu diadakan koordinasi, adanya program-program harus diketahui oleh staf serta adanya peraturan perundang-undangan yang penting untuk disosialisasikan oleh Camat kepada semua staf dan lain-lain."

Hal ini dipertegas dari wawancara penulis dengan Lurah Juaq Asa Bapak Muis, yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Didalam waktu pelaksanaan koordinasi vertikal oleh Camat di Kelurahan ini biasanya paling banyak diadakan antara bulan April sampai Desember karena antara bulan tersebut dimulainya pembangunan jadi setiap adanya program pembangunan, adanya permasalahan atau adanya hal yang bersifat penting langsung diadakan koordinasi oleh Camat."

Dilihat dari waktu pelaksanaan Koordinasi bersifat vertikal yang dilaksanakan oleh Camat menjelaskan bahwa didalam pelaksanaannya masih terdapat masalah-masalah

didalam pelaksanaan koordinasi bersifat vertikal yang dilaksanakan oleh Camat oleh karena itu, ditinjau dari segi waktu pelaksanaan koordinasi bersifat vertikal yang diadakan oleh Camat diatas perlu ditingkatkan.

Koordinasi Horisontal

Pelaksanaan frekuensi Koordinasi yang bersifat horisontal ini merupakan suatu bentuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan, penyatuan-penyatuan, pengarahan-pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tingakat organisasi yang setingkat.

Upaya pelaksanaan Koordinasi bersifat horisontal ini dilaksanakan oleh Camat guna mencapai keselarasan, keserasiaan dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi horisontal, dan antara instansi horisontal dengan dinas-dinas terkait daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh sebab itu maka Camat wajib melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dengan selalu berkoordinasi dengan pejabat atau aparat yang setingkat demi tercapainya suatu peningkatan disegala bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana salah satu faktor penting dalam keberhasilan Camat ialah meningkatkan frekuensi Koordinasi yang bersifat horisontal.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan yaitu penulis melakukan wawancara langsung di Kantor Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, menurut Bapak Yulius Aliansyah, S.IP selaku Camat Barong Tongkok beliau mengatakan bahwa :

"mengenai frekuensi koordinasi yang bersifat horisontal selama ini hampir sama dengan yang bersifat vertikal dengan melihat dan mengacu seberapa besar masalah yang dihadapi serta melihat kearah mana yang tepat untuk menjalankan koordinasi itu jika dilihat dari frekuensinya setiap 2 bulan sekali kami melakanakan Koordinasi bersifat horisontal termasuk ditingkat dinas-dinas terkait."

Hal lain disampaikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Bapak Markus Darmo, SP yang menyatakan bahwa:

"Selama ini didalam pelaksanaan koordinasi bersifat horisontal dilakukan oleh Camat paling tidak dalam jangka waktu setiap 3 bulan sekali dilakukan pertemuan dengan instansi terkait hal ini dilakukan agar terjalinnya kerjasama untuk membahas permasalahan apa saja yang terjadi termasuk permasalahan yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban dilingkungan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat."

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kelurahan Simpang Raya yaitu Ibu Iis Normiyati, SH dan mendapatkan penjelasan yaitu sebagai berikut:

"Sebagai seorang aparatur pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat maka Camat selalu melakukan koordinasi termasuk koordinasi yang bersifat horisontal ke instansi-instansi terkait dimana frekuensi pelaksanaanya setiap 2 bulan sekali yang

melibatkan seluruh instansi yang terkait guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Bapak Lio Riansyah, SP dan mendapatkan penjelasan berkenaan dengan waktu pelaksanaan Koordinasi bersifat horisontal sebagai berikut :

"Pelaksanaan Koordinasi bersifat horisontal itu dilaksanakan jika terdapat adanya permasalahan yang sangat penting untuk dilakukan Koordinasi, adanya kegiatan maupun program pembangunan karena buat apa kita melakukan Koordinasi jika tidak ada permasalahan yang dibicarakan namun kami menyadari setiap memberikan pelayanan pasti terdapat permasalahan untuk itu Koordinasi horisontal ini tetap harus di tingkatkan."

Demikian semakin tinggi tingkat pelaksanaan koordinasi yang bersifat horisontal dilaksanakan oleh Camat dan staf Kecamatan dengan instansi terkait maka semakin berkualitas pelayanan diberikan kepada masyarakat dan masalah akan mudah terselesaikan pula maka dari itu pentingnya pelaksanaan koordinasi bersifat horisontal ini.

Keikutsertaan Staf Kecamatan Mengikuti Rapat Koordinasi

Memecahkan Masalah

Keikutsertaan staf Kecamatan didalam pemecahan masalah adalah sebuah upaya yang harus dilaksanakan oleh Camat didalam rapat koordinasi untuk mempermudah dalam upaya pemecahan masalah. Tujuan dilaksanakan rapat Koordinasi dalam pemecahan suatu masalah ialah untuk menyamakan persepsi tentang pemecahan suatu masalah yang dihadapi sebagai bagian dari tugas aparat pemerintah Kecamatan.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan khususnya pelaksanaan administrasi memiliki tujuan yang ingin dicapai namun didalam perjalanannya masih saja terdapat masalah-masalah yang dihadapi yang dapat menghambat proses pelayanan kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh sebab itu dalam pelaksanaan rapat koordinasi harus dapat pemecahan masalahnya dan seluruh staf mulai dari pimpinan sampai bawahan harus dapat menjalankan tugas ini karena apapun masalah yang dihadapi yang dapat menghambat suatu tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya faktor pendukung yaitu seluruh pegawai sebagai pelaksananya yang merupakan tujuan tersebut adalah tujuan bersama yang mengutamakan bagaimana pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat dilayani dengan baik. Tujuan yang ditetapkan agar pelaksanaan administrasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan staf Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mengikuti rapat koordinasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pihak Kecamatan maka dalam hal ini Kepala Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Bapak Yulius Aliansyah, S.IP mengungkapkan bahwa :

"proses penyelesaian masalah yang kami dihadapi hampir sama dengan apa yang saya lakukan ketika menekankan pentingnya memberikan saran didalam rapat koordinasi. Untuk itu saya selalu memberikan penekanan terhadap pentingnya seluruh Staf didalam penyelesaian suatu masalah"

yang kami hadapi dan semua pegawai Kecamatan mempunyai hak yang sama dalam memberikan pendapat tanpa mempermasalahkan perbedaan pendapat yang terjadi.”

Hal ini Juga didukung oleh Pendapat Ibu Nansi selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan yang menerangkan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keikutsertaan staf Kecamatan dalam memecahkan masalah yaitu sebagai berikut :

“Keikutsertaan seluruh staf Kecamatan termasuk staf di Seksi Ekonomi Pembangunan didalam rapat koordinasi berjalan dengan baik. Ini adanya kesadaran staf tentang pentingnya pemecahan masalah didalam rapat koordinasi karena salah satu tujuan didalam rapat koordinasi ialah pemecahan masalah untuk itu saya termasuk Camat selalu memberikan penjelasan dan kesempatan disetiap rapat koordinasi dalam pemecahan suatu masalah.”

Hal senada juga ditambahkan oleh pendapat dari Kepala Seksi Pelayanan Umum Bapak Sarjono yang mengungkapkan bahwa :

“Didalam rapat koordinasi keikutsertaan seluruh staf Kecamatan termasuk staf di Seksi Pelayanan Umum didalam memecahkan masalah sudah berjalan dengan baik dimana, seluruh staf didalam rapat koordinasi selalu memberikan petunjuk, jalan keluar dan mengusulkan suatu pertimbangan-pertimbangan untuk pemecahan suatu masalah. Keterbukaan dalam penyampaian pendapat dalam rapat Koordinasi untuk pemecahan suatu masalah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi didalam pemecahan suatu masalah selama ini.”

Selanjutnya Kepala Kelurahan Simpang Raya Iis Normiyati, SH juga berkenang memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan staf mengikuti rapat koordinasi dalam memecahkan suatu masalah ditingkat kelurahan dan didapat penjelasan sebagai berikut :

“Keikutsertaan staf termasuk Kepala Kelurahan dalam memecahkan masalah didalam rapat koordinasi cukup baik hal ini dilihat dari antusiasme dalam setiap rapat koordinasi untuk memecahkan suatu masalah salah satu faktornya ialah Camat selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami dalam untuk mengeluarkan pendapat dalam memecahkan masalah.”

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi administrasi tukar menukar informasi sangat diperlukan, agar apabila ada kaitanya dengan pelaksanaan administrasi dapat segera dilaksanakan untuk itu pemecahan suatu masalah didalam rapat koordinasi merupakan suatu upaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam proses kegiatan administrasi untuk itu maka pentingnya keikutsertaan seluruh staf Kecamatan dalam setiap pelaksanaan rapat koordinasi karena, salah satu tujuan diadakannya rapat koordinasi selain memberikan kesempatan bagi staf dalam penyampaian saran juga bertujuan sebagai sarana dalam penyelesaian suatu masalah.

Memberikan Saran

Keikutsertaan staf Kecamatan didalam pelaksanaan rapat koordinasi didalam memberikan saran merupakan hal yang harus di tekankan oleh pimpinan dalam hal ini Kepala Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat karena memberikan saran di dalam rapat koordinasi selain bertujuan membangun sinergi kelembagaan yaitu Kecamatan dalam rangka mencapai suatu tujuan, visi dan misinya yang telah ditetapkan, saran didalam rapat koordinasi ini juga akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh seluruh staf Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang sesuai dengan visi, misi Kecamatan dan keteraturan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Memberikan saran didalam rapat koordinasi ini ialah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan yang berasal dari pimpinan maupun staf terhadap berbagai persoalan yang ada dimana didalam pemberiaan saran ini memiliki sasaran bahwa pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai apa yang telah ditetapkan didalam rapat koordinasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan yaitu penulis melakukan wawancara langsung di Kantor Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordinasi dalam memberikan saran, menurut Bapak Yulius Aliansyah, S.IP selaku Camat Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat beliau mengatakan bahwa:

"mengenai keikutsertaan staf Kecamatan didalam partisipasi memberikan saran didalam pelaksanaan koordinasi berjalan baik. dimana salah satu faktornya ialah saya selaku pimpinan selau menanggapi saran yang bersifat membangun serta adanya sifat terbuka kepada seluruh staf Kecamatan dalam memberikan saran terhadap persoalan yang dihadapi. Biasanya saya juga meminta saran-saran kepada instansi terkait jika mengalami kesulitan atau menemui hambatan yang dilaksanakan didalam rapat koordinasi yang bersifat horisontal."

Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Bapak Santo, S.Sos mengatakan bahwa :

"Didalam rapat koordinasi baik yang bersifat vertikal maupun horisontal kami selalu berusaha memberikan saran-saran yang terbaik buat terciptanya pelayanan yang prima yang menjadi motto kami dan selama ini partisipasi kami dalam memberikan saran berjalan baik karena atasan kami pun sangat merespon dengan baik terhadap saran-saran yang berasal dari kami."

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Bapak Lio Riansyah, SP untuk mendapatkan penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan staf Kecamatan dalam memberikan saran yaitu sebagai berikut :

"Keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordinasi dalam memberikan saran telah berjalan sebagaimana mestinya. dengan adanya himbauan langsung dari Camat terhadap pentingnya saran yang

disampaikan oleh seluruh staf terhadap persoalan yang dihadapi untuk itu Camat selalu bersifat terbuka kepada semua staf dalam penyampaian saran namun Camat perlu meningkatkan kepekaan dalam hal ini turun langsung kelapangan didalam penyelesaian persoalan."

Dalam sebuah proses keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat Koordinasi dalam memberikan saran mutlak dilakukan, dalam hal ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh staf Kecamatan dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Disini seluruh staf Kecamatan sangat berperan penting dalam memberikan saran dan Camat merupakan faktor terpenting didalam upaya memberikan penekanan terhadap pentingnya sebuah saran dari seluruh staf didalam mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan.

Selain itu masalah keikutsertaan staf di tingkat Kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sendiri juga sangat penting didalam menyelesaikan suatu persoalan yang berada ditingkat Kelurahan untuk itu penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Kelurahan Juaq Asa Bapak Muis dan mendapat penjelasan sebagai berikut :

"Selama ini dalam proses pemberiaan saran dalam rapat koordinasi berjalan baik dengan baik. Salah satu faktor ialah karena setiap pemberiaan saran dari staf termasuk dengan Kepala Kelurahan selalu ditanggapi dan Camat sendiri berusaha berpartisipasi langsung dalam penyelesaian masalah untuk itu setiap ada masalah kami tidak pernah diam dalam memberikan saran kepada Camat demi kemajuan kelurahan kami."

Koordinasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan Camat wajib melakukan koordinasi-koordinasi secara menyeluruh demi terwujudnya masyarakat Kecamatan yang sejahterah dalam segala aspek kehidupan.

Salah satu koordinasi yang wajib dilaksanakan oleh Camat selaku pimpinan Kecamatan ialah melaksanakan koordinasi administrasi pemerintah di lingkungan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat hal ini wajib dilakukan untuk terjadinya keteraturan dan memberikan pengarahan didalam pelaksanaan dilapangan sehingga menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Mewujudkan pelayanan yang prima di Kecamatan dan Kelurahan yang berada dilingkungan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat harus dapat diwujudkan oleh Camat dengan cara kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait yang menyangkut masalah peningkatan penyelenggaraan pelayanan administrasi diseluruh lingkungan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Mengenai pelaksanaan koordinasi administrasi pemerintahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebagai Camat Bontang Selatan Bapak Yulius Aliansyah, S.IP memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Koordinasi pelayanan administrasi tingkat Kecamatan termasuk Kelurahan selalu saya adakan untuk adanya persamaan, perpaduan dan keselarasan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi pelayanan baik mengenai prosedur pelayanan serta yang lainnya. Koordinasi pelayanan ini dilaksanakan jika adanya aturan terbaru mengenai proses pelayanan misalnya adanya peraturan terbaru tentang pengurusan KTP, KK, Akte dll maka, kami harus melaksanakan koordinasi pelayanan kepada seluruh staf Kecamatan maupun Kelurahan sebelum disosialisasikan kepada masyarakat."

Hal ini dipertegas oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum Bapak Sarjono yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Camat selama ini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun usaha yang sering kami lakukan ialah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh staf yang terkait dibidangnya termasuk di tingkat Kelurahan guna menyelesaikan masalah pelayanan administrasi, serta mengadakan diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan ini merupakan sifatnya wajib diikuti oleh staf yang bersangkutan mengingat begitu pentingnya masalah peningkatan pelayanan."

Selanjutnya Kepala Kelurahan Juaq Asa Bapak Muis juga memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Koordinasi pelayanan Administrasi pemerintahan Kecamatan dalam upaya peningkatan pelayanan Administrasi sebagai berikut :

"Untuk koordinasi pelayanan administrasi pemerintahan oleh Camat selama ini berjalan sesuai dengan dasar yang mengaturnya. Namun sebenarnya koordinasi pelayanan administrasi lebih sering diadakan Pemerintah daerah sendiri dari pada Camat itu sendiri sehingga perlunya upaya peningkatan Koordinasi pelayanan Administrasi ini."

Selain itu mengetahui perkembangan terhadap pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi pemerintah Kecamatan Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Lio Riansyah, SP selaku Sekretaris Camat Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang memberikan penjelasan tentang Koordinasi pelayanan administrasi untuk menilai kemajuan perkembangan Koordinasi Administrasi di tingkat Kecamatan sebagai berikut :

"Menurut saya selama ini perjalan koordinasi administrasi pemerintahan Kecamatan berjalan ditempat karena tidak mengutamakan efektifitas dan efesiensi. Saya merasakan birokrasi yang seharusnya bisa singkat malah pengurusanya jadi lama contoh proses pembuatan KTP dan KK jika berkas sudah sampai di tingkat Kecamatan proses jadinya sampai 5 hari bahkan lebih karena proses panjang dan selama koordinasi pelayanan administrasi ini berjalan Kecamatan ini belum memiliki SOP sendiri padahal SOP itu sendiri sangat penting."

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Memberikan

Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat.

Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat merupakan suatu hal yang harus dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh pegawai

pemerintahan Kecamatan karena faktor penghambat ialah suatu faktor yang dapat menjadikan pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi tidak berkualitas bahkan menjadikan suatu pelayanan kepada masyarakat itu menjadi lebih buruk jika tidak segera diperbaiki baik itu faktor penghambatnya yang bersumber dari internal maupun eksternal Kecamatan maka dari itu seluruh pegawai pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab dalam menyelesaikan faktor-faktor penghambat tersebut.

Sementara itu faktor pendukung merupakan suatu faktor yang menyebabkan kualitas didalam pelaksanaan pelayanan administrasi menjadi lebih baik untuk itu apapun faktor-faktor yang mendukung kemajuan pelayanan administrasi harus dapat dipertahankan dan ditingkat agar pelaksanaan antara tujuan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mengetahui faktor-faktor pokok penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat berikut ini penjelasan dari Kepala Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Bapak Yulius Aliansyah, S.IP.

"Masalah yang menghambat pelayanan administrasi selama ini hanya bersifat individu bersumber dari kinerja staf bukan yang bersifat kelembagaan sehingga masalah itu tidak begitu mengganggu proses pelayanan administrasi serta banyak yang menyesalkan masih adanya pungutan biaya dalam pengurusan pelayanan administrasi sedangkan yang mendukung ialah ketersediaan anggaran dan adanya kerjasama serta usaha disemua pimpinan Kecamatan dan staf dalam upaya memberikan pelayanan Administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku."

Selanjutnya penulis meminta keterangan Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Bapak Markus Darmo SP mengenai faktor penghambat dan pendukung apa saja yang selama ini dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berikut penjelasannya :

"Faktor yang menghambat selama saya menjadi petugas pelayanan administrasi di kasi Ketentraman dan Ketertiban ini tidak begitu mengganggu proses pelayanan misalnya mengenai kelengkapan persyaratan masyarakat sendiri yang kurang, waktu penyelesaian. Menyangkut masalah faktor pendukungnya ialah ketersediaan semua sarana dan prasarana serta adanya pengawasan yang ketat dari semua atasan mendukung kami untuk melakukan pelayanan secara professional."

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ditingkat Kelurahan maka penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Kelurahan Simpang Raya bapak Lis Normanyah, SH beliau menjelaskan sebagai berikut :

"Mengenai hambatan selama ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebenarnya rata-rata berasal dari masyarakat itu sendiri misalnya pengurusan KTP atau KK masyarakat minta penyelesaian sedangkan persyaratan mereka tidak lengkap jadi tidak kami bisa proses,selanjutnya jauhnya jarak antara kelurahan kami dengan Kecamatan"

sehingga harus mengeluarkan biaya lagi dan di Kelurahan ini membutuhkan genset karena apabila listrik padam maka pelayanan Administrasi kepada masyarakat juga terhenti. Faktor pendukung ialah ketersediaan sarana dan prasarana misalnya komputer, alat komunikasi serta kesadaran diri dari kami dalam memberikan pelayanan administrasi sebaik mungkin."

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Bapak Santo S.Sos dan mendapatkan penjelasan sebagai berikut :

"Selama ini didalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat kami tidak menemukan masalah yang berarti karena setiap ada permasalahan sebelum masalah itu menjadi besar kami bersama seluruh staf Kecamatan melakukan antisipasi termasuk dengan cara meleasaikannya melalui rapat koordinasi."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui secara umum bahwa dari 13 orang responden mengatakan terdapat suatu penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mengatakan ketidak lengkapan fasilitas penunjang terutama genset sebanyak 3 orang responden, penghambat yang bersumber dari masyarakat itu sendiri sebanyak 3 orang responden, yang mengatakan jarak yang begitu, sistem yang berbelit-belit, dan individu dari masing-masing pegawai tidak berkerja secara profesional masing-masing sebanyak 1 orang sedangkan yang menjawab tidak ada faktor penghambat dalam proses memberikan pelayanan sebanyak 4 orang.

Sementara itu faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ialah dari 13 orang responden mengatakan salah satu faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ialah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketersediaannya anggaran demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Ketersediaan dana dalam hal ini anggaran dalam memberikan pelayanan administrasi, terjalinnya kerja sama yang baik antara pihak Kecamatan maupun Kelurahan dengan instansi terkait guna meningkatkan pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang didalam pelaksanaan pelayanan Administrasi, adanya pengawasan dari atasan dalam upaya meningkatkan pelayanan Administrasi dan lain-lain.

Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan tentang pembahasan terhadap data yang telah dikemukakan mengenai masalah ini. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab III, bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data model interaktif maka dalam pembahasannya harus menggambarkan dan menjabarkan fenomena data yang diperoleh dilapangan yang didukung hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis.

Peran Koordinasi yang Dilakukan oleh Camat

Koordinasi Vertikal

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui secara umum bahwa dari 13 orang responden 8 orang responden menjawab frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi yang

dilakukan oleh Camat setiap 1 bulan 2 kali sedangkan yang menjawab 1 bulan sekali sebanyak 5 orang responden, hanya saja didalam pelaksanaan koordinasi masih adanya kekurangan didalam pelaksanaan diantaranya ialah frekuensi pelaksanaan koordinasi yang berbeda-beda dan tidak menentu antara satu dengan yang lainnya ini disebabkan adanya perbedaan masalah yang dihadapi setiap Seksi atau Staf dan Kelurahan dilingkungan Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, adanya kesibukan lain yang masih berhubungan dengan tugas pemerintahan yang mengakibatkan pelaksanaan koordinasi ini tidak dilaksanakan langsung oleh Camat tetapi diwakilkan oleh Sekretaris Camat.

Mengenai frekuensi pelaksanaan Koordinasi di tingkat Desa sendiri frekuensinya juga naik turun tergantung banyaknya kegiatan dan masalah yang dihadapi Kelurahan sehingga perlu dilaksanakan koordinasi oleh Camat dan sebab lain ialah dikarenakan di seluruh masing-masing Kelurahan di Kabupaten Kutai Barat sudah ditetapkan sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sendiri sehingga Kelurahan dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri-sendiri meskipun ada bagian-bagian tertentu yang mesti harus di Koordinasikan kepihak Kecamatan itu sendiri.

Koordinasi Horisontal

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan secara umum dari 13 responden mengatakan bahwa 9 orang responden mengatakan setiap 2 bulan sekali frekuensi pelaksanaan koordinasi bersifat horisontal dilaksanakan sedangkan 4 orang responden mengatakan pelaksanaan koordinasi bersifat horisontal ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. frekuensi pelaksanaan koordinasi bersifat horisontal yang dilaksanakan oleh Camat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah berjalan dengan baik terlihat dari adanya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Camat dan para pembantu Camat dalam hal ini Kepala Seksi dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat didalam pelaksanaan koordinasi yang bersifat horisontal.

Upaya-upaya ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memecahkan masalah yang dihadapi namun, didalam pelaksanaannya sebenarnya tidak maksimal seperti halnya pelakasanaanya koordinasi yang bersifat vertikal dimana pelaksanaanya belum dapat menjadi agenda rutin dimana koordinasi ini dilaksanakan jika dianggap perlu atau terdapat suatu masalah yang bersifat penting untuk dilaksanakan koordinasi dan juga ketidak jelasan rentan waktu dimana antara 2-3 bulan yang dinilai masih kurang didalam pelaksanaan Koordinasi bersifat horisontal mengingat begitu banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat didalam upaya meningkatkan kualitas pelayananan dilingkup Kecamatan Barong Tongkok.

Keikutsertaan staf Kecamatan Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam

Memecahkan Masalah.

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi Administrasi tukar menukar informasi sangat diperlukan, agar apabila ada kaitanya dengan pelaksanaan administrasi dapat segera dilaksanakan untuk itu pemecaham suatu masalah didalam rapat koordinasi merupakan suatu upaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam proses kegiatan administrasi untuk itu maka pentingnya keikutsertaan seluruh staf Kecamatan dalam setiap pelaksanaan rapat koordinasi karena, salah satu tujuan diadakannya rapat koordinasi selain

memberikan kesempatan bagi staf dalam penyampaian saran juga bertujuan sebagai sarana dalam penyelesaian suatu masalah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai keikutsertaan staf Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mengikuti rapat Koordinasi dalam pemecahan suatu masalah di Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sudah berjalan baik dan sinkron dimana dari semua responden yaitu sebanyak 13 orang responden sepakat mengatakan bahwa selama ini staf Kecamatan maupun kelurahan berpartisipasi untuk pemecahan suatu masalah hal ini karena adanya penekanan yang selalu disampaikan oleh Camat terhadap pentingnya rapat koordinasi dalam penyelesaian suatu masalah serta adanya kesadaran dan tanggung jawab langsung yang timbul dari staf untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi demi memajukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi pemicu betapa tingginya partisipasi staf selama ini untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi tidak kalah penting dari tingginya partisipasi staf dalam pemecahan suatu masalah ialah adanya keterbukaan, saling menghargai antar sesama staf yang selalu disampaikan oleh Camat.

Memberikan Saran.

Dalam pelaksanaan proses keikutsertaan staf Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mengikuti rapat koordinasi dalam memberikan saran sudah berjalan dengan baik. Melalui penekanan dari Camat terhadap pentingnya memberikan saran atau sifat keterbukaan oleh seluruh staf Kecamatan maupun Kelurahan merupakan faktor terpenting yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Camat serta selama ini Camat selalu merespon langsung terhadap saran-saran yang ada itulah sebabnya didalam setiap pelaksanaan koordinasi seluruh staf Kecamatan maupun Kelurahan begitu antusias didalam menyampaikan saran-saran dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa dari 13 responden 11 orang responden mengatakan bahwa selama ini yang menjadi salah satu faktor tingginya keikutsertaan dalam memberikan saran ialah Camat selalu menanggapi saran-saran berasal dari semua staf dan bersifat terbuka disetiap pelaksanaan rapat koordinasi kepada semua staf dan 2 orang responden lainnya menjawab bahwa selama ini Camat kurang menanggapi termasuk turun langsung kelapangan dalam penyelesaian persoalan.

Koordinasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa dari 13 orang responden 11 orang responden mengatakan bahwa ditinjau dari segi pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi di Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Camat agar didalam pelaksanaan pelayanan administrasi Kecamatan berjalan sebagaimana mestinya serta adanya komitmen dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku yang menjelaskan prosedur dan pelaksanaan pelayanan serta segi pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik ini dikarenakan adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai sehingga dapat menjalankan pelayanan administrasi Kecamatan dengan baik.

Sedangkan 2 orang responden mengatakan perlunya peningkatan koordinasi pelayanan administrasi oleh Camat karena yang lebih sering melaksanakan koordinasi ini ialah pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan Koordinasi administrasi pemerintahan Kecamatan harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan administrasi serta segera dibuatnya Standar Operasional Pelayanan (SOP) Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang dibahas dalam rapat koordinasi pelayanan administrasi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Memberikan

Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat.

Faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa dari 13 orang responden mengatakan terdapat suatu penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mengatakan ketidak lengkapan fasilitas penunjang terutama ganset sebanyak 3 orang responden, penghambat yang bersumber dari masyarakat itu sendiri sebanyak 3 orang responden, yang mengatakan jarak yang jauh sebanyak 1 orang responden, sistem yang berbelit-belit sebanyak 1 orang responden, dan individu dari masing-masing pegawai tidak berkerja secara professional sebanyak 1 orang sedangkan yang menjawab tidak ada faktor penghambat dalam proses memberikan pelayanan sebanyak 4 orang.

Sementara itu faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ialah dari 13 orang responden mengatakan salah satu faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ialah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketersediaannya anggaran demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Ketersediaan dana dalam hal ini anggaran dalam memberikan pelayanan administrasi, terjalinnya kerja sama yang baik antara pihak Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan dengan instansi terkait

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibuat oleh peneliti baik secara observasi, wawancara, dokumentasi atau melalui dokumen-dokumen yang memperkuat penulis dalam proses penyimpulan.

Adapun kesimpulan-kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul Peran Camat Dalam Koordinasi Administrasi di Kecamatan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi administrasi bersifat vertikal yang diadakan oleh Camat dilakukan dalam frekuensi yang berbeda-beda namun jangka waktu pelaksanaannya antara sebulan 2 kali termasuk ditingkat Kelurahan.
2. Pelaksanaan koordinasi administrasi bersifat horisontal ini Camat maupun Kepala Seksi-Seksi melakukannya setiap 2 bulan sekali dengan berbagai macam usaha seperti melakukan kerja sama dengan atasan atau instansi terkait.

3. Keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordinasi dalam memecahkan masalah sudah berjalan baik hal ini dari adanya penekanan yang selalu disampaikan oleh Camat terhadap pentingnya rapat koordinasi serta adanya kesadaran yang timbul dari staf untuk menyelesaikan suatu masalah.
4. Keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordinasi dalam memberikan saran sudah berjalan dengan baik dengan didukung berbagai faktor seperti Camat selalu menanggapi atau merespon saran serta Camat selalu bersifat terbuka kepada semua staf dalam rapat koordinasi meskipun terdapat kekurangan dalam penyelesaian langsung dilapangan.
5. Koordinasi pelayanan administrasi pemerintah Kecamatan berjalan dengan baik melalui usaha dan komitmen dari Camat demi peningkatan kualitas pelayanan Administrasi.
6. Dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat terdapat faktor penghambat yaitu kurang tersedianya sarana dalam kelancaran proses administrasi seperti sistem administrasi yang masih panjang, kurang profesionalnya staf dalam menjalankan tugas serta terdapat satu Kelurahan yang memiliki jarak yang jauh dengan Kantor Kecamatan.
7. Faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ialah tersedianya anggaran didalam proses meningkatkan pelayanan administrasi dan terdapatnya fasilitas darat dan prasarana yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi kepada masyarakat

Saran-Saran

Selanjutnya berdasarkan data-data yang telah disajikan dan analisis data maupun kesimpulan maka dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kualitas dalam Koordinasi Administrasi di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Baik yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai objek pembangunan.

Peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu :

1. Perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan rapat koordinasi baik itu yang bersifat vertikal maupun horisontal: pelaksanaan rapat koordinasi dijadikan suatu agenda rutin dan tetap yang dilaksanakan oleh Kecamatan, diberikannya anggaran khusus terhadap pembiayaan pelaksanaan rapat koordinasi, serta diberikannya sangsi-sangsi baik kepada Camat maupun kepada seluruh staf jika tidak mengikuti rapat koordinasi administrasi.
2. Camat harus lebih tanggap terhadap saran-saran yang bersumber dari pelaksanaan rapat Koordinasi Administrasi dan lebih sering melihat permasalahan langsung yang terjadi dilapangan.
3. Sebagai seorang pimpinan di Kecamatan, Camat juga harus meningkatkan pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dan wajib diikuti oleh seluruh staf dimana, didalam pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan administrasi tersebut lebih mengutamakan sistem pelayanan administrasi secara efektif dan efisien serta segera

dibuatnya Sistem Operasional Pelayanan (SOP) demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

4. Sebagai seorang pimpinan baik Camat memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia melalui pembiayaan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang dengan sebaik-baiknya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat:

Daftar Pustaka

- Hadi, Sutrisno, 2001 *Metodologi Research*. Andi, Yogyakarta.
- Handoko, T Hani, 2003 *Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan kedelapanbelas*. BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2003 *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Keenam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Rivai, Veithzal, 2003 *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Edisi Kedua* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian Sondang P, 2001 *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono. 2003 *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2005 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Sukmadinata, 2006 *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosdakarya, Bandung.
- Tika, Pabundu, 2006 *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Husain dan Setiady Akbar, Purnomo, 2003 *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Bandung.
- Usman, Husain, 2006 *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset*